

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan Hasil Penelitian yang mengenai Keterlibatan Ulama dalam Politik Praktis di Banyuasin III dan Labar Belakang Buya H.M Husni Thamrin Madani Terlibat dalam Pilkada 2018 serta Faktor yang Memengaruhi Kekalahan Buya H.M Husni Thamrin Madani dalam Pilkada 2018.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana legal untuk pergantian kekuasaan. Disamping bertujuan untuk pergantian kekuasaan, Pemilu juga bermanfaat sebagai ruang evaluasi atas kepemimpinan lima tahunan oleh masyarakat. Pemilu dalam tataran praksisnya adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tersebut mulai dari presiden, gubernur, bupati dan walikota serta wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan.

Selain itu, Pemilu juga merupakan salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Salah satu konsepsi modern diajukan oleh Joseph Scumpeter dalam Gustiana A. Kambo yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi.¹ Penyelenggaraan Pemilu secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan

¹ Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfikar, Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 /06/ Vol. 6. No.2. Tahun 2018.

kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat.²

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elite vote ke popular vote. Juni 2018 yang lalu, masyarakat Banyuwasin kembali disuguhkan sebuah pesta demokrasi. Kali ini untuk pertama kalinya seorang Ulama mau terlibat langsung kedalam dunia Politik melalui Jalur Independen.

Berdasarkan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI NomoR IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah bersama DPR membahas dan mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti dari Undang 32 Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Salah satu tujuan dari pembentukan UU No 32 tahun 2004 dapat di baca pada bagian konsideran menimbang (a), yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk diarahkan agar mempercepat terwujudnya

² Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfikar, Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 /06/ Vol. 6. No.2. Tahun 2018.

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan serta peran dan masyarakat, serta memberikan peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip yang demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta kekhususan suatu daerah yang ada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat, rakyat menyeleksi secara langsung calon yang dianggap terbaik dari daerah mereka. Calon pemimpin yang mampu memimpin dan membawa daerah mereka menjadi lebih baik dan lebih maju, serta menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah tanggung jawab langsung oleh masyarakat demi kemajuan daerah mereka.³

Pilkada langsung seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 56 yang telah direvisi melalui UU No 12 Tahun 2008 dalam ayatnya yang berbunyi:

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pasangan calon yang dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, serta perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang

³ Undang-Undang No 32 tahun 2004.

yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang ini.⁴

Mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 pasal 65, yaitu masa persiapan, tahap pelaksanaan.

Masa persiapan meliputi:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- c. Perencanaan penyelenggaraan, yang meliputi penetapan tata cara serta jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- d. Pembentukan panitia serta Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
- e. Pemberitahuan serta pendaftaran pemantau

Tahap pelaksanaan meliputi:

- a. Penetapan daftar para pemilih
- b. Pendaftaran serta Penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. Pelaksanaan Kampanye
- d. Melakukan Pemungutan suara
- e. Penghitungan suara serta
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih, pengesahan, dan pelantikan.⁵

⁴ Undang-Undang No 12 Tahun 2008.

A. Keterlibatan Ulama dalam Politik Praktis di Banyuasin III

Keterlibatan ulama dalam politik secara praktis dalam konteks dewasa ini menjadi kontroversi tersendiri di kalangan masyarakat dan masyarakat berharap ulama harus konsisten dengan tugas utamanya sebagai figur keagamaan yang bertugas mendakwah keagamaan dan memberikan fatwa. dan Konsentrasi ulama harus tetap berada pada wilayah keagamaan dan tidak boleh bergerak ke territorial politik apalagi politik praktis.

Sebagian masyarakat yang tidak setuju ulama terlibat dalam Politik Praktis seperti Kalangan Akademisi adalah sekedar rasa kekhawatiran terhadap multi peran yang nantinya akan dipikul oleh ulama disamping sebagai tokoh agama sekaligus sebagai politisi. Kekhawatiran tersebut seperti kurang totalitas dalam melaksanakan peran utamanya dalam bidang keagamaan seperti biasanya (pengajian dan dakwah).⁶

Seorang Ulama atau orang yang bergerak dalam bidang agama ikut terlibat terhadap politik atau terjun langsung ke dunia politik itu sah-sah saja.⁷ karena dalam undang-undang membuka kran bagi siapa saja yang akan berbuat untuk bangsa dan Negara terlebih dalam jabatan politik itu sah-sah saja. Dan merupakan hak bagi setiap warga Negara.

Sebagaimana diatur dalam Hak Turut Serta dalam Pemerintahan Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

⁵ Undang-undang No 32 Tahun 2004 Pasal 65.

⁶ Wawancara pribadi dengan H. Senen Naning selaku Tokoh Masyarakat, 17 Juni 2020.

⁷ Wawancara pribadi dengan Mustofa Kamal M. Pd. I selaku Tim Sukses, 17 Juni 2020.

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih maupun memilih dalam pemilihan umum berdasarkan dengan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.⁸

Keterlibatan ulama dalam politik secara praktis menjadi kontroversi tersendiri di kalangan masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat berharap ulama harus konsisten dengan tugas utamanya sebagai figur keagamaan yang bertugas mendakwah keagamaan dan memberikan fatwa. Konsentrasi ulama harus tetap berada pada wilayah keagamaan dan tidak boleh bergerak ke politik apalagi politik praktis. Sebagian masyarakat juga berharap hal yang sebaliknya. Ulama harus terlibat secara intens dalam berbagai peran, termasuk bergerak aktif dalam berpolitik baik substansial maupun politik praktis, karena berpolitik merupakan hak setiap warga negara dan tidak terkecuali ulama.

Fenomena dan kenyataan nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin politik, pendiri dan pemimpin Negara memunculkan kesadaran dan pengakuan dikalangan Muslimin, bahwa islam di samping sebagai agama. Adalah juga sebagai sistem politik. Paling tidak, dapat dikatakan bahwa islam tidak dapat dipisahkan dari

⁸ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia.

politik dan politik tidak mungkin lepas dari islam. Bukankah kenyataannya, Muhammad Saw adalah seorang nabi dan rasul sekaligus negarawan. Nabi Muhammad Saw memimpin dan membangun Negara dengan berbagai kemajuan sosial politik pun telah terbukti, Sepeniggal pendirinya.⁹

Nabi Muhammad SAW, selain sebagai Rasul Allah, juga sebagai Kepala Negara dan Pemimpin Agama. Kerasulannya dimulai di kota Makkah mengajak manusia beriman kepada Allah, beribadah dan berakhlak mulia.¹⁰ Dan ketika 14 abad yang lalu Rasulullah beliau merupakan Figur 1 orang menjadi 2 figur. Dimana Rasul sebagai Pemimpin Agama dan juga sebagai Pimpin Negara. Jelas bahwa keterlibatan ulama dalam hal berpolitik itu sangat berperan penting untuk kelangsungan suatu lembaga ataupun instansi dan baik ia terjun langsung ke dunia politik ataupun ia tidak terjun langsung ke dunia politik secara langsung. Karena sebagai Ulama mereka bisa mentransferkan nilai-nilai agama dalam bentuk kekuasaan.

Dengan keterlibatan ulama yang memahami agama ketika ia terjun ke dunia politik praktis maka Bergeraknya seorang ulama tersebut tetap dalam panduan-panduan Hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dengan pemahamannya seorang ulama tentang hukum islam maka kran untuk berbuat yang tidak baik semakin sulit, karena ia paham yang tidak baik semestinya tidak untuk

⁹ Wawancara pribadi dengan M. Hanif Munaf selaku Tokoh Agama di Desa Langkan, 17 Juni 2020.

¹⁰ M. Basir Syam, *Kebijakan dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw di Madinah (622-632) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)*. Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 1, Juli 2015.

dilakukan.¹¹ Dan menanamkan kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan.

Dalam skala di Banyuasin yang mayoritas masyarakatnya islam saatnya ulama turun untuk berkecimpung dalam bidang politik yang menjadi harapan dengan turunnya ulama ke dunia politik bisa membuat masyarakat menjadi masyarakat yang islami. Menjadikan Masyarakat yang islami ialah Masyarakat yang dibangun seperti Nabi SAW dimana yang mencerminkan keutamaan yang menekankan pada nilai-nilai aspek kehidupan secara langsung terkait dengan nilai dasar tauhid dan persamaan manusia, keadilan dan demokrasi yang memberikan landasan bagi kehidupan sosial dan politik umat Islam pada umumnya. Dengan munculnya pemimpin sebagai seorang ulama yang berkecimpung dalam bidang islam maka ia sebagai pemimpin memastikan seluruh masyarakatnya berada dalam bingkai isalmi.¹²

Sebelum buya mau dicalonkan ada beberapa Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Akademisi, Tokoh Professional berkumpul sepakat bahwa 2016 Pasca Bupati Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK maka 2018 sepakat para Tokoh-tokoh mengusung bahwa Putra Banyuasin harus jadi Bupati dan Wakil Bupati. Karena setelah Pemekaran dari Musi Banyuasin pada

¹¹ M. Basir Syam, *Kebijakan dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw di Madinah (622-632) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)*. Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 1, Juli 2015.

¹² Wawancara pribadi dengan M. Hanif Munaf selaku Tokoh Agama di Desa Langkan, 17 Juni 2020.

2002 sampai 2018 masa periodenya dipimpin oleh orang yang bukan asli Banyuasin pada saat Banyuasin dimekarkan yang seharusnya untuk Pemberdayaan Masyarakat Banyuasin seharusnya Banyuasin dipimpin oleh Putra Asli Banyuasin.

Sejumlah tokoh Pendukung Buya Husni terpantau seperti Tokoh Pemekaran Banyuasin Dr. H Burlian abdullah, Drs. KH. Dimiyati hamzah, SH. H. Kaharuddin aziz, Drs. H. Adn. Abd. Somad, Drs. Abdul Rasyid ning, MM. Zaidin Sarjono, SH. DR H Much Baryadi SE MM ketua Pujasuma Wali Daerah Sumsel, Wakil Gubernur H Ishak mekki, Bakal Calon Wakil Gubernur Sumsel Ir. Mawardi Yahya, perwakilan dari parpol serta masih banyak lagi.

Maka, pada April 2012 muncul nama Buya didaulat oleh beberapa Tokoh untuk bersedia dicalonkan sebagai Calon Bupati periode 2018-2023. Turunnya Buya ke Politik bukan keinginan pribadi tetapi dicalonkan oleh beberapa Tokoh. Buya juga melangkah kedunia politik berpikir terlebih dahulu selama 2 bulan dan ketika April 2017 Buya didaulat, bulan juni Buya menjawab kalau itu keinginan para Tokoh Buya bersedia tetapi dengan beberapa catatan diantaranya:

1. Buya tidak ingin maju sebagai calon bupati melalui jalur partai tetapi melalui jalur independen.
2. Proses yang melauai jalur indepen melalui ktp apabila disahkan oleh kpu sebagai calon bupati maka tidak ada mahar-mahar, uang yang diberikan kepada calon pemilih baik dari buya maupun masyarakat yang mau membantu.

3. Andaikan Allah takdirkan 'Iya' maka yang menjadi Bupati bukan Buya yang terpilih tetapi seluruh masyarakat Banyuasin yang mendukung terpilih buya itulah Bupati Banyuasin.¹³

Itulah beberapa catatan Buya mau dicalonkan sebagai Bupati Banyuasin. akhirnya diterima beberapa Tokoh maka pencalonannya melalui jalur independen dengan mengumpulkan ktp pada saat itu terkumpul 125000 ktp namun berdasarkan dari KPU minimal mengumpulkan 63000 ktp ternyata Buya dapat mengumpulkan 125000 ktp pada saat itu hingga pada akhirnya Buya bersedia menjadi Calon Bupati Banyuasin. Jadi keinginan buya turun ke dunia politik bukan bujuk-bujuk langsung ingin menjadi sebagai Calon Bupati namun dicalon oleh beberapa Tokoh.¹⁴ Keinginan Buya ke politik praktis yaitu karena Bupati sebelumnya tertangkap KPK artinya ada pendekatan-pendekatan agama yang harus kita depankan ketika memimpin sebuah lembaga dalam hal ini memimpin Kabupaten.

Jika kita memahami syariat bahwa sogok-menyogok pemberian seperti itu sudah jelas diharamkan dan namun tidak diatur oleh Undang-Undang dan inilah yang membuka kran terjadinya korupsi. maka mengapa Buya turun ke Dunia Politik padahal sudah mendirikan Pesantren, jika Pesantren mencakup satu desa dan satu kecamatan tapi ketika menjadi Bupati maka untuk Mengatur, Mengelola, Memenejemeni seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin.¹⁵

¹³ Wawancara pribadi dengan Mustofa Kamal M. Pd. I selaku Tim Sukses, 17 Juni 2020.

¹⁴ Wawancara pribadi dengan Mustofa Kamal M. Pd. I selaku Tim Sukses, 17 Juni 2020.

¹⁵ Wawancara pribadi dengan Sobri selaku Tokoh Masyarakat di Desa Langkan, 17 Juni 2020.

Langkah pertama Buya mau turun ke Dunia Politik ingin mengantisipasi bahwa korupsi itu salah. Jadi dengan pendekatan agama Buya yang sebagai ulama maka dengan keulamaannya yang dimiliki bisa menjadi rem dan rambu-rambu jika terpilih untuk menjalankan kebijakan sebagai seorang Bupati. Sejak Pemilihan bupati 2018 berawal dari bermusyawarahnya dari beberapa Tokoh pada saat November 2016 maka pada saat itulah Buya terjun ke dunia politik praktis. yang sebelumnya pada saat Pemekaran Kabupaten Banyuasin pada 2002 Pemilu 2004 buya sudah ditawarkan sebagai anggota DPR namun Buya tidak mau, Buya ditawarkan Kepengurus Partai Politik Buya juga tidak mau, namun Buya tetap di Pondok Pesantren. Jadi 2016 itulah Buya mau turun ke dunia Politik Praktis.

Ada beberapa Tokoh yang mengajak Buya ikut terjun ke Dunia Politik Praktis diantaranya: Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Akademisi, dan Tokoh Professional. Buya turun ke Dunia Politik baru sebatas di Kabupaten Banyuasin pada saat Pemilihan Bupati Bayuasin 2018-2023 baru saat itulah Buya ikut dalam Politik.

Selaku masyarakat mendukung terhadap ulama yang ikut atau berkecimbung langsung ke dunia politik praktis, karena jika ulama berperan secara langsung dia paham agama, dia tahu ilmu halal dan haram, dan kecil kemungkinan apabila beliau sebagai ulama memimpin akan melenceng dari pemahamannya mengenai agama yang selama ini. Ya sebagai masyarakat berharap jika seorang ulama memimpin maka mampu memberikan Kesejahteraan untuk masyarakatnya dan menciptakan Banyuasin yang Bersih tanpa Korupsi pada saat itu, namun ya kembali lagi ke pada

masyarakat yang tidak memberikan pilihan ke pada Buya untuk menjadi Bupati Banyuasin karena masyarakat masih silau dengan uang, lebih memilih uang yang tidak seberapa dibandingkan pemimpin yang Amanah untuk kelangsungan Banyuasin 5 tahun yang akan datang.

Pencalonan Buya menjadi calon Bupati Banyuasin masyarakat mendukung, karena baru pertama kali ada ulama mau mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuasin. Jika seorang ulama menjadi pemimpin ia yang paham agama maka lebih tahu mengenai halal dan haram. Mudah-mudahan harapan kita sebagai masyarakat apabila seorang ulama memimpin setidaknya KKN tidak akan ada lagi di Banyuasin. Itulah sebagai masyarakat mendukung Buya mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuasin. Mendukung seorang ulama mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuasin bisa memberikan Perubahan untuk Banyuasin, karena Banyuasin sendiri belum merasakan Perubahan yang signifikan selama ini. Harapan sebagai masyarakat siapa tahu dengan perannya ulama yang menduduki posisi sebagai pemimpin di Banyuasin ini, mampu menerapkan Banyuasin yang aman, damai, sejahtera, masyarakat yang islami.¹⁶

B. Latar Belakang Buya Husni Terlibat dalam Pilkada 2018 serta Faktor yang Mempengaruhi Kekalahan Buya Husni dalam Pilkada 2018

1. Latar Belakang Buya H.M Husni Terlibat dalam Pilkada 2018

Setelah Bupati yang tertangkap tangan sebelumnya menjadi Pemicu. Buya Husni yang merupakan tokoh agama sangatlah sedih menyaksikan fakta bahwa

¹⁶ Wawancara pribadi dengan Mulyadi selaku masyarakat di Desa Langkan, 17 Juni 2020.

ada korupsi di bidang pendidikan di Banyuasin pada 2016. Buya sebagai orang tua hatinya terpanggil untuk mengayomi Banyuasin kembali. Banyuasin yang dicita-citakan setelah pendirian belum tercapai hingga kini. Seperti sebuah kutipan, “Kezhaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Tapi karena diamnya orang baik”.¹⁷

Dan Mengusung Visi dan Misi dalam Pencalonan Bupati Banyuasin 2018 sebagai berikut:

a. VISI

“Terwujudnya pemerintahan kabupaten banyuasin bersih, maju, masyarakat sejahtera tahun 2023”.

Dalam visi tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu:

1. **Pemerintahan Kabupaten Banyuasin**, bersama masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, dalam penuntasan yaitu segenap aparat sipil negara/ ASN yang mengabdikan wilayah Kab Banyuasin bersama warga masyarakat di kawasan perkotaan, pedesaan, perairan yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal, berkarya-berinteraksi sosial diseluruh wilayah. Artinya semua warga yang beraktifitas dalam kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga yang dilayani maupun yang melayani.

¹⁷ Wawancara pribadi dengan M. Hanif Munaf selaku Tokoh Agama di Desa Langkan, 17 Juni 2020.

2. **Bersih**, adalah singkatan dari: Berdaya saing, Ekonominya kuat, Religius, Sejahtera-berkeadilan, Infrastruktur berfungsi baik ditopang kehidupan masyarakat Harmonis-anti korupsi.

3. **Maju**, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyuasin yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal setempat dan sebagai bagian warga sumsel secara umumnya.

4. **Masyarakat Sejahtera**, meliputi, ekonomi kuat, distribusi pendapatan yang berkeadilan, dilandasi nilai luhur budaya asli negeri dimana nilai-nilai tinggi mutunya diperjuangkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari disemua tempat, masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling menghargai dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta perturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

b. VISI

Dalam rangka mewujudkan visi ini ditetapkan Misi dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang “BERSIH dan ANTI KORUPSI” anti KKN yang pembenahannya dimulai dari aparat pemerintahan, pemerintahan yang melayani, bersih, dan akuntabel melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara struktural maupun kultural.
2. Mewujudkan masyarakat kabupaten yang stabil, tertib dan kondusif, terbebas dari segala gangguan fisik maupun non fisik yang mengancam ketentraman percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dan spiritualitas keagamaan, aling berterima dan menjunjung tinggi toleransi.
4. Menuntaskan capaian kemajuan, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
5. meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

7. meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan sarana dan prasarana dan infrastruktur berbasis tata ruang yang berkelanjutan.¹⁸

Jadi setelah OTT di Banyuasin, Buya sebagai Ulama dan Putra Banyuasin sudah semestinya ikut bekecimpung di dunia Politik agar Banyuasin Bersih tanpa Korupsi. Selain itu Buya sebagai Ulama yang mau turun ke Dunia Politik bisa mengantisipasi bahwa korupsi itu salah. Jadi dengan pendekatan agama sebagai ulama maka dengan keulamaannya yang dimiliki bisa menjadi keutamaannya untuk menciptakan Banyuasin yang Bersih tanpa korupsi dan menjadikan masyarakat yang semakin islami, jika terpilih untuk menjalankan kebijakan sebagai seorang Bupati.

Dan Keinginan Buya terlibat dalam pilkada 2018 ingin membuat masyarakat Sejahtera dengan mengusung saat itu Banyuasin Bersih tanpa Korupsi. Semboyan Buya Banyuasin Bersih tanpa Korupsi karena sejak 2002 Banyuasin di Mekarkan sampai 2016 Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu belum ada perubahan yang signifikan.¹⁹ Dimana Pangkalan Balai Pusat Ibukota Kabupaten Banyuasin yang dulu masih bergabung dengan Musi Banyuasin. Inilah Buya tidak ingin untuk apa ada Pemekaran Bupati jika tidak ada perubahan yang signifikan.

Sehingga muncul ide kalau begitu harus dibangun oleh Putra Banyuasin yang harus bisa membangun karena sebagai Putra Banyuasin tahu kondisi

¹⁸ Profil Komisi Pemilihan Umum Banyuasin 2018.

¹⁹ Wawancara pribadi dengan M. Hanif Munaf selaku Tokoh Agama di Desa Langkan, 17 Juni 2020.

wilayah, karakter masyarakat dan lebih mudah untuk memberikan pembangunan terhadap masyarakat apabila dijalankan oleh Putra Banyuasin itu sendiri, maka Buya menerima pinangan untuk menjadi Calon Bupati.²⁰

Buya Husni juga merasa terpanggil sebagai orangtua untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Banyuasin dalam segala bidang. Dan memperbaiki kehidupan masyarakat Banyuasin, yang selama ini tertinggal dalam segala bidang baik infrastruktur, tingkat pengangguran, kesejahteraan sosial dan keagamaan dikarenakan ulah para pemeritahan yang koruptor di Banyuasin.

2. Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi Kekalahan Buya H.M. Husni Thamrin Madani dalam pilkada 2018

Sebagian Masyarakat sendiri memandang Buya ini sebagai ulama sebaik cukup mengurus Pondok Pesantren saja, dan tidak perlu terjun kedunia politik dan itu dampak dari pikiran yang membatasi ritual dan kewajiban kegamaaan. Yang seharusnya pikiran yang memisahkan antara urusan agama dan dunia. Padahal kita sudah mendapatkan contoh nabi kita beliau sebagai nabi dan pemimpin Negara juga. Bukan berarti sebagai ulama tidak punya kharisma untuk dipilih, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekalahan Buya Husni dalam Pilkada 2018 berdasarkan dari Tim Suksesnya Buya Husni diantaranya:

1. Dari Akar Rumput atau Kader yang kurang maksimal Dimana dari waktu yang saat terbatas dari Buya “Mengiyakan” didaulat dari 2017 sementara pelaksanaan Juni 2018. Artinya kurang lebih 1 tahun kemarin kita memiliki

²⁰ Wawancara pribadi dengan Mustofa Kamal M. Pd. I selaku Tim Sukses, 17 Juni 2020.

19 kecamatan 305 desa dan kelurahan. selama satu tahun tidak bisa menemui masyarakat yang ada diseluruh Desa yang ada di Kabupaten Banyuasin.

2. Daerah yang didominasi dengan Perairan maka yang jarak antara Desa ke Desa sehingga aksesnya sulit untuk ditempuh oleh kendaraan darat. Jadi membutuhkan kendaraan seperti Motor Ketek, Spit dll. Dan itu sangat terbatas waktunya. Itu artinya Buya Husni terkendala dengan kekurangan modal. Dimana dalam Dunia politik untuk mencapai kemenangan harus mempunyai modal yang besar karena itu sudah menjadi resiko ketika seseorang turun ke ranah politik tidak terlepas dari modal yang besar untuk menang dalam pemilihan.
3. Menurut timses nya Buya Husni Faktor dari banyaknya calon sampai lima calon dimana jumlah yang cukup banyak sehingga diatur oleh KPU tidak boleh memasuki masing-masing wilayah saat kampanye. Artinya tidak boleh saling ambil wilayah disitu yang membuat terbatas dalam pergerakan-pergerakan untuk kampanye sehingga sulit untuk memperoleh suara dari para calon pemilih.
4. Tingkat koordinasi yang sulit Dimana banyak diantara desa-desa yang masih dalam “isolir” artinya jarak tempuh yang cukup jauh media komunikasi yang terbatas itu yang tidak memungkinkan berbeda dengan tim-tim yang dikota memang lebih mudah untuk bergerak. Itu artinya selain dari tingkat koordinasi yang sulit terlihat juga Bahwa Buya tidak mempunyai Relawan yang cukup

besar untuk mendapatkan perolehan suara. Berbeda dengan Askolani yang Mempunyai banyak Relawan bahkan sampai ke desa-desa disetap daerah.

5. Dimana yang sangat menentukan buya tidak memberikan janji-janji yang terkait dengan uang karena pilkada bukan rahasia umum. karena politik uang sangat mendominasi dan itu sudah menjadi syarat yang tidak rahasia untuk memenangkan Pilkada namun pasangan dari buya tidak menggunakan politik uang saat pilkada 2018. Karena politik uang sangat mendominasi sehingga masyarakat silau dengan melihat uang.²¹

Seorang ulama yang seharusnya ia berada di ranah agama di Madrasah, di Pengajian, di Pesantren, di Masjid, di lembaga-lembaga Majelis Ta'lim. Dimana para ulama mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang sesuai norma agama. Di dalam ranah politik ketika ia ingin mencapai kekuasaan lazimnya menggunakan berbagai cara, Dari soal kebohongan itu sarapan, soal ketidakjujuran itu hobi pada umumnya.

Jarang kita melihat bahwa persoalan tentang politik itu tidak dimanipulasi. Sehingga dunia politik ini semestinya tidak baik untuk seorang ulama, namun faktanya jika seorang ulama ingin terjun ke dunia politik bukan suatu larangan itu merupakan hak asasi setiap manusia, dan didalam agama juga harus ada pemimpin. Sementara yang dibutuhkan masyarakat sebagai seorang pemimpin itu adalah bagaimana pemimpin membawah masyarakatnya menjadi lebih baik.

²¹ Wawancara pribadi dengan Mustofa Kamal M. Pd. I selaku Tim Sukses, 17 Juni 2020.

Kita melihat bahwa saat Pemilihan Bupati Banyuwasin dan yang ikut dalam Pilkada ini merupakan Tokoh Politik dan Tokoh Agama. Jelas kita tahu bahwa orang yang mengerti tentang politik juga harus memahami agama. Namun bagaimana cara seorang tokoh politik dan tokoh agama merebut kekuasaan dalam Pilkada. Dari Tokoh Agama yang masih diminati oleh masyarakat, namun Tokoh agama dikalahkan oleh Tokoh Partai. Dari Buya Husni yang ikut Pilkada dari jalur Independen, dan Askolani melalui Partai Politik, Dimana sudah dua kali mencalonkan diri dalam Pilkada.

Kekalahan Buya Husni dalam Pilkada karena Mesin dari Partai Perjuangan Demokrasi Perjuangan (PDIP) ini bekerja. Sedangkan Buya Husni tidak ada Partai. Namun Buya Husni sebagai Tokoh Agama masih mendapatkan tempat dihati masyarakat, terbukti Buya mendapatkan suara sampai 20%. Buya Husni kalah karena Askolani mempunyai mesin partai yang bekerja dengan solid, dari banyak relawannya, tim suksesnya bahkan sampai ke desa-desa dan Rt diberbagai daerah. Sedangkan Buya Husni tidak mempunyai mesin partai untuk bekerja saat Pilkada.

Dan kita lihat juga dari Kurangnya Kreativitas dari tim sukses Buya Husni dalam pemilihan bupati merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai kemenangan. Kreativitas dari tim sukses juga menentukan menang dan kalahnya Buya Husni yang maju dalam pemilihan bupati apalagi melalui jalur independen. Buya Husni sebagai Ulama hebat dengan tim sukses yang lemah, kegagalan yang didapat. Buya Husni yang lemah dengan tim sukses kuat, keberhasilan

diraih. Dalam setiap tindakan untuk merealisasikan rencana menjadi hasil yang diharapkan, pemimpin harus fokus untuk mempekerjakan orang-orang yang kreatif, proaktif, strategis, disiplin dan optimis di dalam sebuah tim sukses. Tim sukses yang seharusnya menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, terdefinisi dan konsisten dan setiap anggota tim sukses harus berkomitmen untuk menunaikan tanggung jawab mereka secara total.

Ketika keberadaan tim sukses disamping para kandidat yang maju dalam pemilihan bupati, membuat kegiatan kampanye lebih teratur, lebih tertib, terencana dan efektif. Dan dapat kita ketahui bahwa pada masa kampanye keberadaan tim sukses saja tidaklah cukup, tetapi juga harus beriringan dengan tujuan yang terukur. Memang Buya Husni dan kandidat yang dari partai politik usungan memang harus cerdas dalam memilih karakter dari pribadi-pribadi yang akan bergabung dalam tim sukses. Tim sukses yang seharusnya ditempatkan berdasarkan bakat dan kemampuannya, dimana tim sukses harus dapat mengatur dan menyusun strategi pemenangan dan pemantauan sekaligus memastikan bahwa strategi tersebut sudah berjalan sesuai harapan. karena aturan dan kebijakan harus ditetapkan sebagai fondasi yang sangat mendasar untuk membangun etos kerja tim sukses yang efektif.

Dan memang Sumber daya keuangan memainkan peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktivitas politik yang berkelanjutan. Sumber daya ekonomi merupakan hal esensial yang dapat melancarkan seluruh aktifitas politik baik itu untuk administrasi, peralatan kampanye, dan kegiatan pendukung pencalonan

yang lain. Hal ini melihat Buya Husni sebagai calon bupati dari jalur independen tidak mempunyai kendaraan politik yaitu partai politik sehingga secara otomatis tidak mempunyai basis massa yang kuat. Untuk itu faktor keuangan memang menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting untuk mendukung ataupun memberikan kemenangan calon independen dalam Pilkada.

Tabel 4 Pasangan lawan Buya H.M Husni Thamrin Madani dalam
Pencalonan Bupati Banyuasin diantaranya:

Kandidat	Partai	Jumlah	Peresentase
1. Agus Yudiantor dan Hazuar Bidui	PKS/PAN	34.787	9,01%
2. Arkoni dan Azwar Hamid	HANURA/PKB	99.481	25,78%
3. Buya H.M Husni dan Supartijo	INDEPENDEN	80.321	20,81%
4. Syaiful Bakhri dan Agus Salam	GOLKAR/PKPI	39.749	10,30%
5. Askolani Jasi dan Slamet	PDIP	131.593	34,10%
			100%
Suara Sah		385.931	95,12%
Suara Tidak Sah		19.786	4,88%
			100%

Partisipasi Pemilih	405.717	69,53%
Pemilih tidak berpartisipasi	177.794	30,47%
Pemilih Terdaftar	583.511	100%

Sumber: KPU BANYUASIN

Pasangan Askolani dan Slamet, unggul di 12 Kecamatan, Sedangkan Arkoni-Hazwar Hamid unggul di empat Kecamatan yakni Tanjung Lago 6.208 suara, Muara Telang 5.544 suara, Rantau Bayur 9.173 suara dan Betung 9.320 suara.

Pasangan Buya Husni dan Supartijo unggul di dua Kecamatan yakni Banyuasin III 10.145 suara dan Sembawa 5.174 suara.²²

Artinya bahwa Tokoh Agama juga tidak sepenuhnya mendukung ataupun ikut berkontribusi dalam Pencalonan Ulama yang terjun ke Ranah Politik untuk menjadi Kepala Daerah. Karena Faktor Suku yang lebih mendominasi diberbagai daerah yang merata masyarakat lebih unjuk terhadap kandidat yang satu suku sama mereka dan basis suku yang lebih dominan banyak, daripada melihat dari sisi agama, karena kemenangan yang diperoleh kepala daerah yang saat ini selain Askolani Ketua Pengurus dalam Parpol, beliau juga berasal dari suku yang masyarakatnya mayoritas bersuku sama, karena Buya Husni sendiri tidak mendapatkan Kemenangan di Daerah yang masyarakatnya bersuku Jawa contohnya, terbukti kita melihat dalam perolehan suara yang dicapai Askolani dalam kemenangan di 12 Kecamatan, yaitu Talang Kelapa 22.596 suara, Banyuasin II 5.244 suara, Sumber Marga Telang 2.944 suara, Makartijaya 5. Suara, Muara Padang 5.723 suara, Muara Sugihan 10.044 suara , Air Saleh 8.058 suara, Suak Tapeh 2.865 suara, Rambutan 8.200 suara, Air Kumbang 5.699 suara, Pulau Rimau 7.479 suara dan Tungkal Ilir 5.433 suara. Sedangkan Buya Husni unggul di dua Kecamatan yakni Banyuasin III 10.145 suara dan Sembawa 5.174 suara. Artinya Askolani mempunyai sentimen suku yang kuat dalam memenangkan Pilkada pada tahun 2018 lalu.

Jadi setelah kita lihat dalam pilkada pada tahun 2018 Buya Husni sebagai seorang Ulama dikalahkan oleh Tokoh Politik. Dari kekuatan seorang tokoh politik

²² Profil Komisi Pemilihan Umum Banyuasin 2018.

yang mempunyai mesin partai yang bekerja dengan solid dan lebih mudah untuk memperoleh massa yang kuat untuk menang, sedangkan Buya Husni sendiri terhambat dalam pergerakan karena tidak ada mesin partai yang bisa membantu bekerja untuk memperoleh massa yang kuat untuk mencapai kemenangan.

Namun berdasarkan dengan Teori Marketing Politik Buya Husni masih Laku terutama di daerah Pangkalan Balai. Walaupun Marketing Politik Buya Husni masih banyak kelemahannya. Dan secara umum jumlah suara yang diterima Buya Husni cukup baik. ini merupakan sebagai tanda masyarakat banyuasin masih punya rasa hormat kepada seorang ulama.